



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 100.4.7.1/9420/DUKCAPIL

NOMOR: 035/Setmen.Birohk/KL.01/08/2025

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN SERTA
PENINGKATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI ANAK DALAM LINGKUP
TUGAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **TITI EKO RAHAYU, S.E., M.A.P.**

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Gambir, Jakarta Pusat 10110

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 016/MEN/KL.01/08/2022 dan Nomor 119/4781/SJ tanggal 18 Agustus 2022 tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data korban, pelaku, dan/atau saksi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak **PIHAK KEDUA**, melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai” atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 17 (tujuh belas) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat sekarang, golongan darah, agama, status hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, dan nama ayah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 24 (dua puluh empat) elemen data berupa data Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat sekarang, golongan darah, agama, status hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, nomor akta kawin, tanggal kawin, nomor akta cerai, tanggal cerai, nomor akta lahir, foto wajah, dan data anggota keluarga dalam satu KK kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
 - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;

- c. memberikan data berupa nomor registrasi laporan yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam setiap dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan layanan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
 - k. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak, **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan dukungan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA kepada anak; dan
 - b. memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA bagi anak berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam melaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memfasilitasi pertukaran data anak yang belum memiliki Akta Kelahiran dan KIA kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. mengkoordinasikan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dapat bersinergi dengan perangkat daerah yang membidangi layanan kependudukan dan pencatatan sipil guna peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA bagi anak;
 - c. melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada perangkat daerah yang membidangi layanan kependudukan dan catatan sipil guna peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan anak yaitu akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 3

Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data berupa nomor registrasi laporan yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai” atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU** atas akses data kependudukan meliputi 17 (tujuh belas) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat sekarang, golongan darah, agama, status hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, dan nama ayah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - mendapatkan hak akses Data Kependudukan meliputi 24 (dua puluh empat) elemen data berupa data Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat sekarang, golongan darah, agama, status hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, nomor akta kawin, tanggal kawin, nomor akta cerai, tanggal cerai, nomor akta lahir, foto wajah, dan data anggota keluarga dalam satu KK dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak, **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk mendapatkan data anak dari **PIHAK KEDUA** guna difasilitasi penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA.
- (4) Dalam melaksanakan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran dan KIA dari **PIHAK KESATU** atas data anak yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Pemadanan Data

- Dalam hal diperlukan layanan pemadanan data kependudukan, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan permohonan pemadanan data berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemadanan Data Kependudukan.
- PIHAK KESATU** memberikan hasil pemadanan data kependudukan berupa elemen data yang sesuai dengan elemen data yang terisi dan diajukan **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** menyampaikan data balikan pemadanan kepada **PIHAK KESATU** bersamaan dengan penyampaian hasil data padan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Evaluasi dan Pelaporan

- PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- adanya perubahan nomenklatur **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ttd.

ttd.

Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

TITI EKO RAHAYU, S.E.,M.AP.

LADK	MED	DIR IDKN
6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PUU	SES
<i>[Signature]</i>	

PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>